

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERDESAAN

(Suatu Kasus di Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat)

Lies Sulistyowati

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PUAP dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah *Survey-explanatory*, dengan 176 orang responden diambil melalui kluster random sampling, dengan alokasi proporsional pada 4 Gapoktan. Analisis data dengan deskriptif dan kuantitatif (uji t-student). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PUAP sudah sesuai prosedur. Kinerja pelaksanaan program PUAP termasuk kriteria sedang. Dampak PUAP terhadap teknis budidaya relatif kecil, sedangkan terhadap pendapatan, PUAP berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan peserta PUAP, namun masih kecil peranannya dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Implikasi kebijakannya, PUAP masih perlu dilanjutkan dengan perbaikan pada aspek pendampingan dan peningkatan akses terhadap informasi pasar.

Kata kunci: *implementasi, PUAP, pendapatan, dan pengentasan kemiskinan*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bagi bangsa Indonesia. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan pemerintah, namun hasilnya belum optimal menurunkan jumlah penduduk miskin. Data makro menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 masih berjumlah 31,02 juta orang atau 13,33% dari total penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan data pada Maret 2009, jumlah penduduk miskin adalah 32,53 juta orang (14,15%), terlihat ada penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 11,51 juta (BPS, 2010). Hal ini merupakan dampak dari berbagai kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter, serta berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan.

Alamat Korespondensi:

Lies Sulistyowati, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Kampus Jatinangor, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Bandung. Email : liesindra@yahoo.com

Jika dicermati, penurunan kemiskinan di pedesaan berjalan lebih lambat dibandingkan perkotaan, terlihat dari data penurunan kemiskinan di perkotaan 0,81 juta orang, sedangkan di pedesaan 0,69 juta orang. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa pengentasan kemiskinan di pedesaan lebih lambat dari kota, pada hal berbagai program langsung sudah dilaksanakan oleh pemerintah.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang angka kemiskinannya cukup tinggi, yakni: 153.100 orang atau 12,3% dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang antara lain: PUAP, P2LK, Pidra, PK2PM, KUBE, PKMP LUEB, Primatani, KUR, DEMAPAN, FEATI, P4K, Raskin, BLM, JPS Kesehatan, JPS Pendidikan, dan lainnya; namun penurunan jumlah kemiskinan belum berjalan secara optimal.

Hall dan Midgley (2004), menyatakan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivation materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivation relatif

dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Sedangkan Friedmann (1979), melihat kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial, dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna.

BAPPENAS (2004), memberikan definisi kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang (laki-laki/perempuan), tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak masyarakat antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Pendekatan yang lebih sederhana dilakukan oleh BPS yakni dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan metode ini, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak, baik kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kebutuhan minimum makanan adalah besarnya nilai rupiah yang dikeluarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan minimum energi sebesar 2100 kalori per hari. Sedangkan kriteria kebutuhan minimum bukan makanan adalah nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum bukan makanan (antara lain: perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya) (BPS, 2010).

Kemiskinan bisa dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yakni: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut jika faktanya memang tidak bisa

memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan kemiskinan relatif jika dibandingkan dengan orang/kelompok lainnya yang lebih kaya. Menurut sifatnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi: kemiskinan kronis (*chronic poverty*) dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Penduduk yang miskin kronis, pada umumnya tidak mempunyai akses yang cukup terhadap sumberdaya ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangannya perlu kebijakan struktural yang bertujuan memperbaiki akses mereka terhadap sumberdaya dan pasar (Urip, 2007).

Dalam mengamati kemiskinan, diperlukan adanya suatu ukuran atau indikator tertentu. Raharto dan Romdiati (2000), mengklasifikasikan jenis kemiskinan menjadi:

- a. Kemiskinan alamiah: yaitu terjadi akibat langkanya sumberdaya dan rendahnya produktivitas.
- b. Kemiskinan struktural: yaitu terjadi karena lembaga-lembaga yang ada atau struktur sosial masyarakat menciptakan keadaan dimana sekelompok masyarakat tidak menguasai sumberdaya, fasilitas, dan sarana ekonomi secara merata. Kondisi ini membatasi peluang ekonomi bagi golongan sosial tertentu, sehingga golongan ini mengalami kemiskinan.

Selanjutnya Rachman, dkk. (1996), mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi, yakni:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul karena perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya yang rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya pendapatannya juga rendah.
- c. Kemiskinan bisa juga disebabkan karena perbedaan dalam akses modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Nurkse, pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan (Sumber: Nurkse dalam Kuncoro, M., (1997))

Oleh karena itu, jika menginginkan pengurangan kemiskinan, maka lingkaran tersebut harus diputus. Pemutusan lingkaran bisa melalui berbagai cara, yaitu: upaya peningkatan modal, upaya peningkatan produktivitas, upaya peningkatan investasi maupun perbaikan kelembagaan penunjang, serta sarana dan prasarana ekonomi perdesaan.

Dengan telah dilaksanakan Program PUAP selama 2 tahun di Kabupaten Sumedang, maka tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Mengkaji implementasi dan kinerja PUAP di Kabupaten Sumedang dan 2) Mengkaji dampak PUAP terhadap kemampuan teknis budidaya/ kemampuan usaha, tingkat pendapatan serta pengentasan kemiskinan di perdesaan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *Survey Explanatory*, sedangkan teknik pengambilan sampel secara *Two-Stage Cluster Random Sampling*. Dari 23 kecamatan penerima PUAP, diambil secara random 2 kecamatan dan 2 gapoktan untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan yang diambil adalah Kecamatan Buahdua (Gapoktan Tahanjaya dan Ciembutan) dan Kecamatan Tanjungkerta (Gapoktan Sugihmukti dan Mekarsari). Selanjutnya dari setiap gapoktan diambil petani responden secara *proporsional random sampling*, sehingga diperoleh sampel seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi Responden per Kecamatan di Kabupaten Sumedang

Kecamatan	Gapoktan	Jumlah Responden (orang)
Buahdua	Tahanjaya	55
	Ciembutan	33
Tanjungkerta	Sugihmukti	46
	Mekarsari	42
Jumlah:		176

Jenis data yang dikumpulkan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan petani responden peserta PUAP. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber terkait, diantaranya: Tim PUAP, Penyelia Mitra Tani, Penyuluh pendamping, Kantor Kecamatan Buahdua, Tanjungkerta, Badan Statistik Sumedang dan Jawa Barat, media masa baik media cetak maupun media elektronik.

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Implementasi program dan kinerja PUAP dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan 12 indikator dari: 1) Pembinaan dan pengawasan, 2) Pengelolaan dan penyaluran dana PUAP, dan 3) Perkembangan kelembagaan. Kriteria yang digunakan: Kinerja baik jika yang sesuai > 67%, kinerja sedang jika yang sesuai 33,3% - 66%, dan kinerja kurang baik jika yang sesuai < 33,3%.

Sedangkan dampak program PUAP terhadap tingkat pendapatan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan uji beda rata-rata berpasangan (uji t-student), antara pendapatan petani sebelum (tahun 2007) dan sesudah PUAP (tahun 2010).

Ho: $\mu_1 = \mu_2$ = Pendapatan petani sebelum adanya program PUAP tidak berbeda dengan pendapatan petani setelah adanya program PUAP (dampak PUAP tidak ada)

H₁: $\mu_1 \neq \mu_2$ = Pendapatan petani sebelum adanya program PUAP berbeda dengan pendapatan petani setelah adanya program PUAP (dampak PUAP positif)

Statistik Uji: $t_{hitung} = \frac{\bar{B}}{S_B / \sqrt{n}}$ dengan:

$$\bar{B} = \frac{\sum B_i}{n}$$

dimana:

Bi = Beda (selisih antara pendapatan sebelum PUAP dan setelah adanya PUAP)

S_B = Standar deviasi dari data beda

n = Banyaknya sampel (30 responden)

Kriteria Uji: Tolak Ho jika $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$.

Analisis tingkat kemiskinan dengan menggunakan 2 kriteria, yaitu:

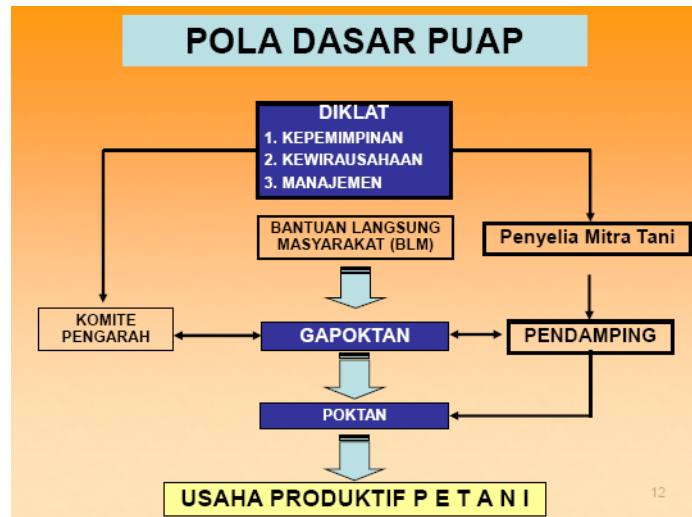
- 1) Kriteria BPS Sumedang: yaitu Garis Kemiskinan Rp.165.337/cap/bulan pada tahun 2007 dan Rp. 216.053,00 /cap/bulan tahun 2010
- 2) Kriteria Sayogyo, yakni pendapatan yang disetarakan beras (Th 2007 Rp.2.750/kg, dan tahun 2010 Rp.3.700,00/kg beras): Paling Miskin (< 240 kg/kapita/thn), Miskin Sekali (240-360 kg/kapita/thn), Miskin (360-480 kg/kapita/thn), Cukup Kaya (480-960 kg/kapita/thn), dan Kaya (> 960 kg/kapita/thn).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi dan Kinerja PUAP

Program PUAP merupakan langkah terobosan Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dengan pemberian dana sebesar 100 juta per gapoktan. PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani, pedagang, rumah tangga miskin di perdesaan, melalui koordinasi gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah.

Implementasi PUAP di Kabupaten Sumedang sudah sesuai prosedur, yakni mengacu pada Pola Dasar yang dsapat dilihat pada Gambar2.



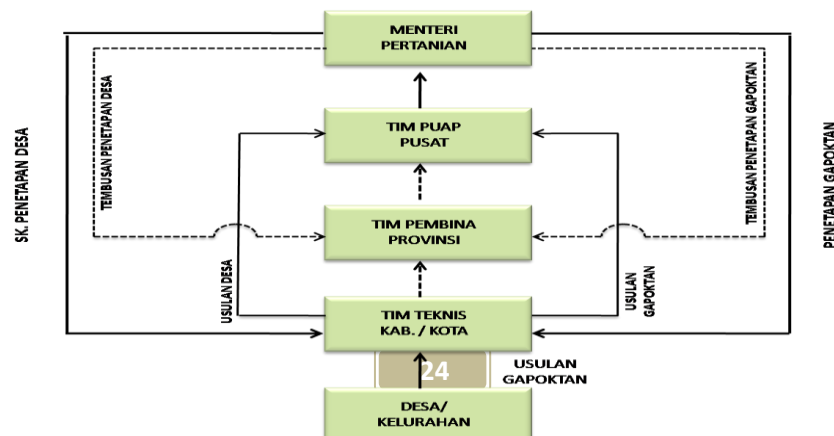
Gambar 2. Pola Dasar Pelaksanaan PUAP (Departemen Pertanian, 2009)

Pada Gambar 2, menjelaskan bahwa pola dasar pelaksanaan PUAP di daerah penelitian meliputi: pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan usaha, pendampingan dan pemberian fasilitas modal usaha yang dikoordinasikan oleh gapoktan. Untuk membangun kemandirian gapoktan, maka perlu didampingi oleh Penyuluh Pendamping (PP) dan Penyelia Mitra Tani (PMT), sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai tujuan PUAP.

Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada penyuluh dan pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP. Sedangkan penyuluh pendamping

berperan melakukan identifikasi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian, memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha, membantu permasalahan yang dihadapi oleh Gapoktan, melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa, memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produktif sesuai dengan potensi desa dan memberikan bimbingan teknis pemanfaatan bantuan tersebut serta pembuatan laporan akhir.

Demikian juga dalam mekanisme dan kriteria untuk desa dan Gapoktan Penerima PUAP, sudah sesuai prosedur yang ditetapkan, yakni mengacu pada Juknis PUAP, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Penetapan dan Gapoktan Penerima PUAP 2009
(Departemen Pertanian 2009)

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa kriteria seleksi untuk desa yang akan menerima PUAP sebagai berikut:

1) Tahapan Penetapan Desa PUAP

Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat oleh Kelompok kerja (POKJA) identifikasi PUAP. Penetapan desa dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria desa miskin yang mempunyai potensi pertanian yang berasal dari: (1) Data Lokasi PNPM-Mandiri; (2) Data desa miskin dari BPS; dan (3) Data desa program Departemen Pertanian.

2) Tahapan Pengusulan dan Penetapan Desa

Tim teknis kabupaten/kota melakukan identifikasi calon desa PUAP sesuai dengan indikator desa PUAP yang telah ditetapkan oleh TIM PUAP Pusat, calon desa penerima PUAP diusulkan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan usulan tersebut di atas, Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi berdasarkan kriteria desa miskin, desa yang belum menerima PUAP tahun sebelumnya dan kesesuaian nomenklatur Permendagri Nomor 6

Tahun 2008 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

3) Tahapan Penetapan Gapoktan/Poktan

Kepala Desa/Lurah lokasi desa PUAP yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, mengusulkan calon Gapoktan penerima BLM PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Bupati/Walikota, dan selanjutnya diusulkan kepada Tim PUAP Pusat yang ditembuskan kepada Tim Pembina Provinsi.

Jumlah Desa PUAP di Jawa Barat terus bertambah dari 621 Desa pada tahun 2008 menjadi 1321 pada tahun 2009. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Sumedang, terjadi peningkatan 68%, dari 35 desa pada tahun 2008, menjadi 59 desa pada tahun 2009. Usaha yang dibiayai oleh PUAP diantaranya adalah budidaya tanaman pangan, peternakan, industri rumah tangga, pemasaran hasil pertanian skala mikro, dan usaha lain yang berbasis pertanian.

Untuk melihat kinerja pelaksanaan progra PUAP, digunakan 12 indikator seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Program PUAP

Indikator	Jumlah Anggota Gapoktan (persen)		
	Sesuai	Hampir sesuai	Tidak sesuai
Pembinaan dan Pengawasan			
1.Frekuensi pertemuan	17	49	34
2. Metode penyampaian	69	31	0
3.Keaktifan anggota	7	33	60
Pengelolaan dan Penyaluran Dana			
1.Pengelolaan dana	60	40	0
2.Kesesuaian dengan Kebutuhan Modal	10	33	57
3.Revolving	56	26	18
4.Pengembalian	63	25	12

Perkembangan Kelembagaan			
1.Jumlah Anggota	75	25	0
2.Keaktifan Gapoktan	37	63	0
3.Ketersediaan Saprodi	50	33	17
4.Harga Saprodi	42	58	0
5.Kemitraan	0	20	80
Rata-rata	41,8	35	23,2

Dari Tabel 2, terlihat bahwa kinerja pelaksanaan program PUAP masih dalam kriteria sedang, karena hanya 41,8% yang sesuai. Indikator yang perlu mendapat perhatian adalah frekuensi pertemuan anggota dengan PMT maupun penyuluh yang dirasa masih belum sesuai harapan petani. Hal ini disebabkan minimnya biaya operasional sedangkan cakupan wilayah kerjanya terlalu luas. Dalam pengelolaan dan penyaluran dana secara umum sudah berjalan lancar, juga pengembalian berjalan sesuai kesepakatan, hanya 12% yang tidak sesuai, dikarenakan panen yang gagal, dan sebagian lagi karena merasa dana PUAP adalah hadiah (*charity*). Yang masih dirasakan kurang oleh petani adalah nilai pinjaman yang belum sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan agribisnis petani. Untuk pengembangan kelembagaan, yang perlu ditingkatkan adalah

rintisan kearah kemitraan, baik dengan hulu (produsen input), maupun hilir (pedagang atau pengolah hasil pertanian). Akses terhadap pasar sangat penting, untuk menghindari risiko fluktuasi harga (*price fluctuation risk*).

3.2. Dampak PUAP terhadap Kemampuan Teknis Budidaya/Kemampuan Usaha, Tingkat Pendapatan serta Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan

Dalam program PUAP tercakup adanya bimbingan teknis usaha agribisnis, termasuk teknis budidaya bagi petani untuk meningkatkan produktivitas usahataniannya. SRI (*System Rice intensification*) merupakan teknik intensifikasi budidaya padi yang memperhatikan aspek kelestariannya.

Adapun dampak PUAP terhadap kemampuan teknis budidaya/kemampuan usaha petani disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Dampak PUAP terhadap Teknis Budidaya Petani (*System Rice Intensification*)

Teknis Budidaya (SRI)	Sebelum PUAP (persen)	Sesudah PUAP (persen)	Peningkatan (persen)
1. Penggunaan benih unggul berlabel	89	98	9
2. Teknik penanaman (Sistem legowo 2:1)	68	88	20
3. Teknik pengolahan lahan (dengan traktor)	35	65	30
4. Teknik pemupukan (pupuk organik)	19	54	35
5. Teknik PHT (pestisida organik)	60	75	15
6. Teknik pengairan (macak-macak)	88	92	4
7. Teknik panen (waktu dan alat panen yg tepat)	91	94	3
8. Teknik pasca panen (pedal thresher & mesin perontok)	89	95	6
Rata-rata	68,625	83,875	15,25

Hasil analisis pada Tabel 3, memperlihatkan bahwa dengan program PUAP terjadi peningkatan penggunaan teknologi budidaya SRI 15,25%, yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan produktivitas usahatani. Tingkat penggunaan teknologi setelah PUAP belum maksimal, baru mencapai 83,875%, hal ini disebabkan beberapa kendala yakni:

- Kondisi lahan yang luasannya kecil-kecil, dan sebagian di perbukitan, menyebabkan penggunaan traktor untuk pengolahan lahan sulit dilakukan.
- Kurangnya ketersediaan pupuk organik, sehingga petani masih menggunakan pupuk anorganik yang lebih mudah diperoleh di pasar/kios saprotan.

- Kurangnya intensifnya bimbingan dari penyuluh pendamping, karena luasnya wilayah tugas seorang penyuluh.
- Dalam penggunaan pestisida organik juga belum maksimal, karena sebagian petani masih terbiasa dan yakin akan efektifitas pestisida kimia untuk memberantas hama dan penyakit.

Untuk analisis pendapatan nominal dihitung dengan mengurangkan penerimaan dengan total biaya (total pengeluaran). Pendapatan riil dihitung dengan disesuaikan dengan IHK tahun 2007 dan 2010. IHK pada tahun 2007 sebesar 111,11 dan IHK setelah PUAP (tahun 2010) adalah 122,25.

Hasil analisis pendapatan petani sebelum dan sesudah PUAP dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah PUAP (Per 0,2 ha per musim)

Keterangan	Sebelum PUAP	Sesudah PUAP	Peningkatan	
			Nilai	Persen
Total Biaya (Rp)	1.023.808,00	1.443.746,00	419.938,00	41,0
Produksi (kg)	1.194,00	1.280,00	86,00	7,2
Harga jual (Rp/kg)	2.750,00	3.700,00	950,00	34,5
Penerimaan (Rp.)	3.283.500,00	4.736.000,00	1.452.500,00	44,2
Pendapatan Nominal (Rp.)	2.259.692,00	3.292.254,00	1.032.562,00	45,7
R/C	2,21	2,28	0,07	3,3
Pendapatan Riil (Rp.)	2.033.743,14	2.693.050,31	659.307,17 *)	32,4

Keterangan: *) significant pada $\alpha = 5\%$

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa penerimaan nominal petani setelah PUAP lebih tinggi Rp 1.032.562,00 atau naik 45,7% dari penerimaan yang diperoleh petani sebelum PUAP. Peningkatan penerimaan tersebut diakibatkan oleh peningkatan produksi 7,20 % serta harga jual (GKP) yang lebih baik dari sebelum PUAP, yakni meningkat 34,5%. Biaya produksi total pun mengalami kenaikan 41%, karena harga pupuk dan pestisida mengalami kenaikan. Dengan adanya peningkatan penerimaan yang lebih besar daripada peningkatan biaya produksi maka nilai R/C rasio juga meningkat 3,3%, dari 2,21 sebelum PUAP menjadi 2,28 setelah PUAP.

Jika pengaruh inflasi dihilangkan, dengan menggunakan index harga, maka dipelumnnya diperoleh pendapatan riil peserta PUAP yang meningkat Rp.659.307,17 atau 32,4% dari sebelumnya, dan uji-t student berpasangan, hasilnya significant pada $\alpha = 5\%$.

Indikator lain keberhasilan pelaksanaan PUAP adalah melihat dampak PUAP dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan, terutama peserta PUAP. Karena kriteria kemiskinan, baik versi BPS maupun Sayogyo adalah per cap per tahun, sedangkan anggota keluarga rata-rata 4 orang, maka pendapatan keluarga/tahun dibagi 4 untuk memperoleh income/cap/th.

Hasil analisis dampak PUAP terhadap Tabel 5.
Pengentasan Kemiskinan terlihat pada

Tabel 5. Dampak PUAP terhadap Pengentasan Kemiskinan

Uraian	Sebelum PUAP	Sesudah PUAP
Pendapatan keluarga dari UPA (Usaha Produktif Agribisnis)	4.519.384,00	6.584.508,00
Income/cap/th	1.129.846,00	1.646.127,00
Garis kemiskinan BPS	1.984.044,00	2.592.636,00
Garis kemiskinan Sayogyo (setara 480 kg/cap/th)	410,85	444,90

Keterangan: harga beras th 2007 Rp.2.750,00, tahun 2010 Rp.3.700,00

Dari Tabel 5, terlihat bahwa meskipun program PUAP berhasil meningkatkan pendapatan peserta, namun petani masih berada di bawah garis kemiskinan, baik kriteria kemiskinan BPS maupun kriteria Sayogyo. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan program PUAP masih perlu diintensifkan dan diperbaiki aspek-aspek yang belum maksimal.

Selanjutnya akan dianalisis pendapatan total keluarga, yang terdiri dari pendapatan sektor pertanian (*on-farm*), ditambah dengan dari luar pertanian (*off-farm*) dan juga pendapatan anggota keluarga lainnya. Pendapatan *off-farm*, biasanya dari berdagang/warungan, buruh bangunan,

pengolahan hasil (keripik singkong, peuyem, sale pisang, dan lainnya), kerajinan tangan, dan ada juga tukang ojek. Khusus untuk petani di Kecamatan Buahdua (Gapoktan Tahanjaya dan Ciembutan), terbuka peluang untuk memperoleh pendapatan dari luar sektor pertanian (*off-farm*) sebagai pedagang makanan dan tukang parkir, karena adanya obyek wisata air panas yang ramai dikunjungi masyarakat lokal maupun luar Sumedang pada hari libur.

Pada Tabel 6 berikut disajikan pendapatan total keluarga sebelum dan sesudah PUAP dalam 1 tahun, serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.

Tabel 6. Pendapatan Total Keluarga Sebelum dan Sesudah PUAP dalam 1 Tahun, serta Dampaknya terhadap Pengentasan Kemiskinan

Sumber Pendapatan Keluarga	Sebelum PUAP		Sesudah PUAP	
	Rp/thn	Persen	Rp/thn	Persen
Pertanian (Usaha Produktif Agribisnis)	4.519.384,00	41,20	6.584.508,00	44,24
Non Pertanian	3.450.000,00	31,45	4.650.000,00	31,24
Pendapatan Anggota Keluarga lain	3.000.000,00	27,35	3.650.000,00	24,52
Pendapatan Total Keluarga	10.969.384,00	100,00	14.884.508,00	100
Income/cap/th – dilihat dari rata-rata	2.742.346,00		3.721.127,00	
Garis kemiskinan BPS	1.984.044,00		2.592.636,00	
Garis kemiskinan Sayogyo (setara 480 kg/cap/th)	997,20		1005,70	
Dilihat dari per responden income/cap/th yang dibawah garis kemiskinan		82,4		78,4

Keterangan : harga beras th 2007 Rp.2.750,00, tahun 2010 Rp.3.700,00

Dilihat dari komposisi pendapatan total keluarga (Tabel 6), tidak banyak mengalami perubahan, dari sebelum PUAP. Namun terlihat sumbangan dari pendapatan off-farm sangat menolong untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis tetap menjadi pilihan yang tepat sebagai motor penggerak (*engine growth*) perekonomian perdesaan.

Temuan yang cukup menarik dalam penelitian ini adalah, secara rata-rata diperoleh income/cap/tahun sudah melebihi garis kemiskinan. Namun analisis per responden, ternyata sebelum PUAP terdapat 82,4% yang berada di bawah garis kemiskinan, dan menurun 4% menjadi 78,4% sesudah PUAP. Hal ini memberikan indikasi

bahwa terjadi disparitas pendapatan di perdesaan, baik sebelum maupun sesudah PUAP.

Data makro juga memperlihatkan bahwa, meskipun berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang antara lain: PUAP, P2LK, Pidra, PK2PM, KUBE, PKMP LUEB, Primatani, KUR, DEMAPAN, FEATI, P4K, Raskin, BLM, JPS Kesehatan, JPS Pendidikan, dan lainnya, namun penurunan jumlah kemiskinan belum berjalan secara optimal.

Pada Tabel 7 terlihat bahwa di Kabupaten Sumedang dari tahun 2006-2009 terjadi penurunan tingkat kemiskinan hanya 2,82% selama 4 tahun.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang, Tahun 2006-2009

Uraian	2006	2007	2008	2009
Jumlah Penduduk Miskin	154.700	161.800	159.700	153.100
Presentase Penduduk Miskin	15,12	15,63	15,18	12,30
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	165.337	184.226	186.166	216.053

Sumber: BPS Kab Sumedang Tahun 2010

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program PUAP di Kabupaten Sumedang sudah sesuai prosedur, baik dalam penetapan Desa/Gapoktan penerima PUAP, maupun dalam pencairan dana BLM-PUAP. Kinerja pelaksanaan PUAP termasuk kriteria sedang, dengan kelemahan yang menonjol adalah belum terjalannya kemitraan dengan industri hulu maupun hilir dan pasar, sosialisasi belum secara intensif dan meluas, besaran dana yang belum sesuai dengan kebutuhan peserta PUAP.
2. Dampak Program PUAP terhadap teknologi budidaya relatif kecil, karena sebelumnya petani sudah menerapkan teknologi pada program terdahulu, seperti: P4K, Primatani, Demapan, dan lainnya.

Sedangkan untuk penerapan SRI, masih dirasakan kurangnya ketersediaan pupuk organik maupun pestisida organik. Program PUAP telah berhasil dalam meningkatkan pendapatan pesertanya, namun masih kecil peranannya dalam pengentasan kemiskinan para peserta PUAP, dan masyarakat pedesaan secara umum.

4.2. Saran

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa saran kebijakan, yaitu:

1. Perlu sosialisasi yang lebih intensif dan meluas pada masyarakat, sehingga persepsi

- masyarakat tidak salah dalam memandang PUAP sebagai sejenis bantuan atau hibah yang tidak perlu dikembalikan
2. Pelatihan dan workshop bagi PMT dan Penyuluh pendamping serta pengurus gapoktan meskipun sudah dilakukan perlu ditingkatkan, agar keterampilan dan keahlian mereka memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
 3. Diperlukan tambahan insentif dan dana operasional bagi tim teknis kabupaten, PMT dan penyuluh, agar frekuensi pembinaan dan pembimbingan kepada pengurus gapoktan maupun peserta PUAP, bisa ditingkatkan.
 4. Dalam upaya penerapan teknis budidaya SRI, maka perlu ketersediaan input (benih, pupuk organik, pestisida organik) yang tepat waktu, jumlah, dan harga.
 5. Tujuan PUAP untuk mengurangi kemiskinan masih relatif terbatas, oleh karena itu perlu keaktifan dari PMT dan penyuluh pendamping untuk mengembangkan agro-industri berbasis dasar lokal, untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan peserta PUAP.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Distribusi Penduduk Miskin*. Jawa Barat.
- Departemen Pertanian. *Pedoman Umum Program PUAP*. Melalui <<http://database.deptan.go.id/PUAP/tampil>>. [Februari 2009].
- Friedmann, John. 1979. *Urban Poverty in Latin America, Some Theoretical Considerations*. dimuat dalam: *Development Dialogue*, Vol.1, Upsala, Dag Hammarskjold Foundation.
- Hall, Anthony dan James Midgley. 2004. *Social Policy for Development*. London: Sage Publications Ltd.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. YKPN. Yogyakarta.
- Rachman, Benny dkk. 2010. *Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian di Tingkat Rumah Tangga dan Wilayah Perdesaan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Raharto, Aswatini dan Haning Romdiati. 2000. *Identifikasi Rumah Tangga Miskin dalam Seta, Ananto Kusuma et.al (editor), Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII* 259-284. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Urip, Sumayo. 2007. *Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Faktor Penyebabnya*. Melalui <<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/>> (Februari 2011).

DAFTAR PUSTAKA